

**PENGELOLAAN TATA TERTIB SISWA
BERBASIS POIN PELANGGARAN
(STUDI SITUS SMK NEGERI 3 PACITAN)**

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Kepada
Program Studi Manajemen Pendidikan
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Ilmu Manajemen Pendidikan



Oleh

**Amanudin Ashari
Q.100.100.032**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2013**

**PENGELOLAAN TATA TERTIB SISWA
BERBASIS POIN PELANGGARAN
(STUDI SITUS SMK NEGERI 3 PACITAN)**

¹Amanudin Ashari, ²Sutama
¹Tenaga Pendidik Kabupaten Pacitan
²Staf Pengajar UMS Surakarta

Abstract

The purposes of this study are (1) to describe the characteristics of students' rules of conduct enforcement organization based on offense point at *SMK Negeri 3 Pacitan*; (2) to describe the characteristics of students' rules of conduct enforcement activity based on offense point at *SMK Negeri 3 Pacitan*. This investigation is a qualitative research using ethnography design. The researcher conducted this research at *SMK Negeri 3 Pacitan*. The main research subjects were the principal, vice principal, teachers, and students. Data were collected using the following techniques: in-depth interview, observation, and documentation. The analysis model used was an analysis arranged in site. The data validity was tested using credibility, transferability, confirmability, and dependability. The results of this study are: 1) the enforcement of students' rules of conduct at *SMK Negeri 3 Pacitan* is a part of school programs for student affair where its activity is in the line of work of vice principal for student affair. The implementation stages include planning, organizing, implementation and monitoring. Measurable targets that are the purposes of the application of students' rule of conduct at *SMK Negeri 3 Pacitan* is pressing the offense level above 15 point to 5% per month. The mechanism of action taken in enforcing order in *SMK Negeri 3 Pacitan* regulated in principal decree No. 421.5/269.1/408.37.16.03/2011 2) Enforcement activities of students' rules of conduct related to the following activities: a). Preparation of students' rules of conduct, b). Socialization, c). Implementation. d). Recording point, e) Guidance. f). Evaluation of students' rule of conduct.

Key words: *rule of conduct, offense, activity*

Pendahuluan

Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Syam (2008:13) menyatakan bahwa “ manusia dan warga negara Indonesia masa depan

ialah subyek yang memiliki integritas unggul secara mental – moral – kultural dalam menghadapi dinamika dan tantangan globalisasi, liberalisasi dan postmodernisme”. “Amanat mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai amanat nasional adalah sekaligus sebagai *visi-misi: nation and character building*”. Syam (2008:12)

Dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1 didalamnya terkandung harapan-harapan yang sangat mulia yaitu terciptanya peserta didik yang “ memiliki keuletan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian yang baik serta akhlak yang mulia” KBRI Tokyo (2003:1). Namun demikian kenyataannya masalah besar yang melanda dunia pendidikan kita saat ini adalah menurunnya tatakrama kehidupan sosial dan etika moral menimbulkan ekses negatif yang merisaukan masyarakat dalam bentuk banyaknya penyimpangan-penyimpangan tingkah laku peserta didik. Suharno (2008:57) menyatakan penyimpangan berbagai norma agama dan sosial kemasyarakatan dalam bentuk kurang hormat pada guru dan pegawai, kurang disiplin waktu, kurang mengindahkan peraturan, kurang memelihara keindahan dan kebersihan lingkungan, perkelaian pelajar, narkoba, berkeliaran di jalanan, di terminal bus, di stasiun, di mall dan tempat-tempat wisata saat jam pelajaran dan sebagainya. Kondisi ini harus segera diantisipasi karena hal ini akan mengancam generasi muda bangsa kita khususnya dan tata kehidupan masyarakat umumnya.

Pemahaman akan penerapan tata tertib sekolah ini sangat penting agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaannya. Sering diberitakan di media masa bahwa seorang guru yang menegakkan ketertiban malah berujung pada pelanggaran HAM dengan ancaman hukuman penjara, ini akan berpengaruh pada guru dalam menjalankan tugasnya. Firawati (2011) menyatakan bahwa “ berdasarkan laporan KPAI pada 2007 disebutkan bahwa dari 555 kasus kekerasan yang menimpa anak, 18 % pelakunya adalah orang terdekat dan 11,8% adalah guru”.

Penegakan disiplin dengan cara punishment (hukuman fisik) menjadi tidak wajar dilakukan saat ini di sekolah-sekolah dengan alasan melanggar hak azasi manusia. Misalnya ketika ada guru yang mencubit, padahal maksudnya

adalah mengingatkan siswa, tetapi bisa dijerat karena termasuk bentuk kekerasan dengan menggunakan dasar UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Disebutkan dalam UU itu, anak harus mendapatkan perlindungan salah satunya dari kekerasan.

Tugas bagi pendidik atau sekolah untuk bisa menciptakan lingkungan belajar di sekolah yang tertib, nyaman, menyenangkan dan terbebas dari adanya kekerasan secara fisik terhadap siswa. Murphy (2010:7) merekomendasikan *“Promote the use of positive behavioral supports by passing H.R. 2597, and provide teachers and school administrators with the tools and resources necessary to develop safe and effective methods for encouraging positive student behavior”*.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengelolaan tata tertib siswa berbasis poin pelanggaran di SMK Negeri 3 Pacitan. Penerapan poin pelanggaran sebagai strategi khusus dalam menegakkan tata tertib di SMK Negeri 3 Pacitan. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan karakteristik organisasi penegakan tata tertib siswa berbasis poin pelanggaran di SMK Negeri 3 Pacitan dan mendeskripsikan karakteristik aktifitas penegakan tata tertib siswa berbasis poin pelanggaran di SMK Negeri 3 Pacitan

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif atau naturalistik. Dengan penelitian naturalistik, maka situasi lapangan akan tetap bersifat natural, alami, wajar, dan tidak ada tindakan manipulasi, pengaturan, ataupun eksperimen (Harsono, 2008:155). Penelitian ini menggunakan desain etnografi, yang merupakan proses penjelasan menyeluruh tentang kompleksitas kehidupan kelompok (Sukmadinata, 2007: 107). Masalah etnografi memfokuskan diri pada fenomena yang berjalan, gejala yang sedang berlangsung (Sutama, 2010: 77). Untuk itu data yang diperoleh melalui interaksi dengan para partisipan dalam situasi sosial yang dipilih.

Dalam penelitian kualitatif, informan tidak disebut sebagai subjek penelitian, karena sumber data menyangkut orang mempunyai kedudukan yang

sama antara yang diteliti dan peneliti. Dalam penelitian ini melibatkan orang yang berperan sebagai orang kunci (*key person*) atau orang yang berkompeten. Data dari nara sumber diperoleh melalui wawancara. Dalam penelitian ini nara sumbernya adalah kepala sekolah, wakasek, petugas ketertiban, guru, dan siswa.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2006: 308). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui (1) observasi, (2) wawancara mendalam, dan (3) dokumentasi. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tertata dalam situs Proses Analisa data ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi Uji keabsahan data menggunakan kredibilitas, tranferabilitas, konfirmabilitas dan dependabilitas.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. *Karakteristik Organisasi Penegakan Tata Tertib Berbasis Poin Pelanggaran di SMK Negeri 3 Pacitan.*

Penegakan kedisiplinan di sekolah sebagai lembaga pendidikan yang bersifat formal, perlu mempunyai perencanaan aturan atau tata tertib sekolah yang baik. Hal ini dikarenakan peranan tata tertib di sekolah dapat mengatur kehidupan para siswa baik yang bersifat kurikuler maupun ekstrakurikuler. Tata tertib sekolah adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan sekolah sehari-hari dan mengandung sanksi atau hukuman terhadap yang melanggarnya. Penegakan tata tertib siswa di SMK Negeri 3 Pacitan merupakan bagian dari program sekolah di bidang kesiswaan yang dalam kegiatannya berada pada lini kerja wakil kepala sekolah bidang kesiswaan .

Dalam pelaksanaan penegakan ketertiban siswa di SMK Negeri 3 Pacitan dibentuk satuan tugas dengan nama STP2K. Satuan inilah yang bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penegakan ketertiban siswa setiap harinya. Dalam pelaksanaan penegakan ketertiban siswa di SMK Negeri 3 Pacitan

telah menerapkan system poin, yang dalam praktiknya melibatkan semua unsur pendidik dan tenaga kependidikan. Seperti : kepala sekolah, komite, STP2K, guru mata pelajaran, guru BK, WKS, pembina OSIS, dan siswa (perwakilan). Penyusunan acuan atau rambu-rambu yang jelas mengenai aturan yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan penegakan tata tertib sekolah dengan melibatkan semua komponen sekolah. Hal ini sesuai persyaratan dalam penyusunan tata tertib dalam Depdiknas (2001:13) yaitu “ Melibatkan seluruh komponen sekolah”.

Dalam memaparkan organisasi penegakan tata tertib siswa di SMK Negeri 3 Pacitan menggunakan tahapan sesuai dengan empat fungsi pengelolaan dalam organisasi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan tata tertib siswa adalah kegiatan menetapkan tujuan atau sasaran penegakan tata tertib, bagaimana strategi untuk mencapainya, dengan melibatkan semua komponen sekolah dan mempertimbangkan prinsip rasionalitas, transparansi dan nilai dasar tata hubungan antar warga sekolah. Perencanaan penegakan tata tertib mempertimbangkan prinsip rasionalitas, transparansi dan nilai dasar tata hubungan antar warga sekolah, tata tertib SMKN 3 Pacitan dilaksanakan secara transparan dengan adanya pelaporan tiap dua minggu di papan pengumuman dan akses terhadap keberadaan poin yaitu tiap siswa bisa melihat poin tata tertibnya di kantor BK pada guru BK.

Tata tertib SMKN 3 Pacitan telah memuat nilai dasar tata hubungan antar warga sekolah yang meliputi ketaqwaan, sopan santun pergaulan, kedisiplinan/ketertiban, kebersihan/kesehatan/kerapian, dan keamanan. Disamping itu tata tertib ini dilengkapi dengan beberapa larangan, sanksi dan penghargaan. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Suharno (2009:59-60) bahwa “ Ada dua acuan dasar dalam merumuskan tata tertib yaitu nilai dasar dan tata hubungan, larangan, sanksi dan penghargaan “. Latar belakang dan sekaligus tujuan dari strategi diterapkannya system poin ini adalah bagaimana menemukan cara terbaik dalam penegakan tata tertib siswa yang lebih terkontrol dengan adanya panduan yang jelas dan transparan.

Pengorganisasian adalah keseluruhan proses dengan pembagian tugas untuk menentukan mekanisme kerja dengan menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, sehingga penegakan tata tertib dapat dilaksanakan secara maksimal. Pengorganisasian tata tertib sekolah mencakup memaksimalkan sumberdaya yang ada baik sumberdaya manusia yang terdiri dari guru, Tata usaha, Wali Kelas, BK, K3, WKS, STP2K, Kepala Sekolah serta sarana yang dibutuhkan. Adanya pembagian tugas dan mekanisme yang jelas dalam penegakan tata tertib telah dilakukan di SMKN 3 Pacitan. Hal ini sesuai dengan dokumen yang berupa Surat keputusan Kepala sekolah Nomor: 421.5/269.1/408.37.16.03/2011 tentang tata tertib Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Pacitan. Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Sagala (2010:61) bahwa “ organisasi yang baik harus ada susunan administratif, aturan dan mekanisme koordinasi” untuk menjalankan aktivitasnya.

Indikator dan ukuran poin pelanggaran yang jelas, maka pengukuran poin pelanggaran bisa diimplementasikan dengan mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran mutu dan strategi yaitu dengan membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran poin pelanggaran yang telah ditetapkan dalam sasaran mutu penegakan ketertiban di sekolah. Sasaran yang terukur yang merupakan tujuan dari penerapan tata tertib siswa di SMKN 3 Pacitan adalah menekan tingkat pelanggaran ketertiban diatas 15 point menjadi 5%.per bulan. Adanya sasaran ini telah sesuai dengan yang disampaikan Sagala (2010:56) bahwa perencanaan meliputi kegiatan menentukan tujuan, bagaimana mencapai dan berapa lama waktu yang diperlukan”

Karakteristik pelaksanaan penegakan kedisiplinan berbasis poin pelanggaran memiliki substansi yang harus dipahami sendiri oleh siswa. Pada hakekatnya siswa sudah menyadari bahwa seluruh peraturan dan tata tertib sekolah adalah demi terlaksananya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan harapan masyarakat sekolah. Konsep pelaksanaan tata tertib bagi siswa SMK Negeri 3 Pacitan yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah, selain dikenakan poin pelanggaran, juga akan diberikan pembinaan dari BK dan wali kelas serta mendapatkan tindakan-tindakan dan sanksi. Penambahan perolehan

poin secara khusus diberikan kepada siswa-siswa yang berprestasi seperti : siswa yang berprestasi di dalam kelas, siswa yang berprestasi dalam kejuaraan lomba dan aktivis siswa seperti OSIS dan juga siswa - siswa yang mewakili sekolah.

Pengawasan pelaksanaan penegakan tata tertib dilakukan oleh kepala sekolah dan tim STP2K, yang akan merekomendasikan para petugas ketertiban yang ditunjuk dalam memantau setiap kegiatan siswa agar tidak terjadi penyimpangan. Dalam pengawasan ini akan dipantau sejauh mana pencapaian target sasaran mutu sekolah khususnya bidang ketertiban siswa, juga dilakukan dan langkah lanjut apa yang harus dilakukan baik untuk perbaikan pelaksanaan, mekanisme ataupun terhadap isi tata tertib. Kegiatan pengawasan ini dilakukan juga secara incidental dan secara periodik mingguan saat upacara hari senin dan rapat koordinasi wakasek kesiswaan dan setiap bulan saat rapat dinas rutin dan rapat koordinasi tim kesiswaan. Kegiatan ini sesuai dengan apa yang disampaikan Winardi (2009:4) bahwa “ kegiatan pengawasan merupakan aktivitas memastikan apakah organisasi menuju kearah tujuan yang telah ditetapkan” sehingga kalau ada penyimpangan segera dapat memperbaikinya.

Jika dibandingkan dengan teori yang ada menurut Suharno (2008:9) yang menyatakan bahwa “pendekatan sistem dalam suatu organisasi pendidikan merupakan metode yang berkaitan erat dengan pemecahan masalah pendidikan yang semakin kompleks”. Pendekatan sistem poin pelanggaran dalam pengelolaan tata tertib siswa di sekolah sebagai suatu metode untuk memecahkan masalah ketertiban yang semakin kompleks di sekolah dengan tahapan, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Dari penelitian yang telah dilaksanakan dalam memaparkan organisasi penegakan tata tertib siswa di SMK Negeri 3 Pacitan menggunakan tahapan sesuai dengan empat prinsip pengelolaan dalam organisasi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Jadi Organisasi Penegakan Tata Tertib Berbasis Poin Pelanggaran yang diterapkan di SMK Negeri 3 Pacitan sesuai dengan teori yang ada yang telah disampaikan oleh peneliti.

Dibandingkan dengan yang dilakukan oleh Jack O. Ajowi and Enose M. W. Simatwa, 2010 mengadakan penelitian tentang peran Bimbingan Konseling

dalam meningkatkan ketertiban siswa di distrik Kisumu Kenya, dengan thesisnya yang berjudul *“The role of guidance and counseling in promoting student discipline in secondary schools in Kenya: A case study of Kisumu district* . Dari penelitian ini ditemukan bahwa peranan guru bimbingan konseling sangat kecil dalam mendorong ketertiban siswa. Hukuman fisik masih banyak digunakan dalam mengatasi masalah ketertiban siswa.

Dalam penelitian ini diketahui bahwa latar belakang dan sekaligus tujuan dari strategi diterapkannya system poin pelanggaran adalah menemukan cara terbaik dalam penegakan tata tertib siswa yang lebih terkontrol dengan adanya panduan yang jelas dan transparan. Tata tertib siswa berbasis poin pelanggaran di SMK Negeri 3 Pacitan melibatkan semua pihak antara lain kepala sekolah, komite, STP2K, guru mata pelajaran, guru BK, WKS, pembina OSIS, dan siswa (perwakilan) tidak hanya mengandalkan guru Bimbingan Konseling saja. Pengorganisasian tata tertib sekolah mencakup dan memaksimalkan sumberdaya yang ada baik sumberdaya manusia yang terdiri dari guru, Tata usaha, Wali Kelas, BK, K3, WKS, STP2K, Kepala Sekolah serta sarana yang dibutuhkan. Pembagian tugas yang jelas dalam penegakan tata tertib telah di SMKN 3 Pacitan sehingga penegakan tata tertib dapat dilaksanakan secara maksimal.

2. Karakteristik Aktivitas Penegakan Tata Tertib Berbasis Poin Pelanggaran di SMK Negeri 3 Pacitan.

Dalam penelitian pengelolaan tata tertib siswa berbasis poin pelanggaran di SMK Negeri 3 Pacitan ini. Aktifitas penegakan tata tertib siswa berkaitan dengan kegiatan sebagai berikut a). Penyusunan tata tertib, b). Sosialisasi pada semua warga sekolah, c). Pembentuk tim yang bertugas memantau dan menilai sikap, ucapan dan tindakan siswa di sekolah serta memberi poin, d). Mencatat hasil pemantauan / poin siswa dan mengkomunikasikannya, e). Guru, wali kelas, guru BK mencermati, mengawasi siswa yang bermasalah dan membantunya untuk memecahkan masalah yang dihadapi, f). Hasil pemantauan dan penilaian yang

terdapat dalam portofolio merupakan bahan penilaian untuk setiap akhir semester.

Dari berbagai poin penting dalam aktivitas penegak tata tertib siswa yang diuraikan diatas, hal pertama yang dilaksanakan dalam pengelolaan tata tertib siswa di SMK Negeri 3 Pacitan Yaitu : penyusunan tata tertib siswa. Penyusunan tata tertib siswa berbasis poin pelanggaran di SMK Negeri 3 Pacitan melibatkan semua komponen sekolah yaitu kepala sekolah, komite sekolah, STP2K, guru mata pelajaran, guru Bimbingan Konseling, Wakil Kepala Sekolah dan dalam penyusunan tata tertib ini juga dilibatkan perwakilan siswa dari pihak OSIS yang dimulai sejak tahun lalu. Penyusunan tata tertib siswa berbasis poin pelanggaran di SMK Negeri 3 Pacitan melalui tahapan Konsultasi dengan Ka UPT, jika ada yang berubah dievaluasi, Sosialisasi awal Ka UPT, WKS2, BK, Ketertiban, Sosialisasi pada semua elemen sekolah, komite, masyarakat umum. Keterlibatan komite sekolah selaku wakil orangtua juga dilakukan dalam rangka penyusunan maupun sosialisasi pelaksanaan tata tertib terutama kepada orangtua siswa, tata tertib siswa yang akan diterapkan dilegalisasi oleh komite dan disoalisasikan saat rapat pleno komite.

Keterlibatan dari semua pihak ini, dalam penyusunan tata tertib menjadikan semuanya menjadi lebih transparan dan dapat diterima oleh semua pihak. Hasil dari tata tertib yang telah disepakati bersama disosialisasikan pada semua elemen sekolah, komite, masyarakat umum. Sosialisasi dilaksanakan pada awal tahun pelajaran dengan memberikan dokumen tata tertib baik kepada siswa maupun orang tua. Adanya sosialisasi yang ada semua pihak sesuai dengan yang dikemukakan Yell and Rozalski (2008:11,14) *“Developing the policies with the participation of administrators, teachers, parents, and students will help to ensure that the policies are reasonable and related to a legitimate educational function.”*. Smit (2010) dalam penelitiannya *“The Role of School Discipline in Combating Violence in Schools in The East London Region”* juga

merekomendasikan bahwa perlunya keterlibatan orangtua proses pendidikan dan dalam penyusunan tata tertib sekolah

Pelaksanaan aktivitas penindakan atau pemberian poin bagi pelanggar tata tertib dilakukan oleh seluruh guru dan tenaga kependidikan dengan cara mencatat siswa yang melanggar pada slip poin, Slip poin ini rangkap tiga warna putih untuk pencatat poin, warna merah untuk diberikan pada siswa, dan yang kuning untuk penindak. Pencatatan poin dilakukan oleh petugas khusus dari STP2K bagian pencatat poin. Dari catatan ini kemudian direkap dan disetorkan ke guru Bimbingan dan Konseling untuk mendapatkan tindak lanjut pembinaan yang diperlukan serta mengkomunikasikan rekap tersebut pada papan pengumuman. Pembinaan terhadap siswa yang bermasalah dilakukan secara kontinyu melalui tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh petugas yang di SMKN 3 Pacitan pembinaan dengan adanya peringatan sampai jika memang siswa tidak bisa dibina lagi siswa dikembalikan kepada orang tua yang bersangkutan.

Evaluasi dalam pelaksanaan tata tertib siswa berbasis poin pelanggaran di SMK Negeri 3 Pacitan dilaksanakan secara kontinyu. Evaluasi dilaksanakan untuk menentukan langkah lanjut yang harus diambil untuk merbaiki pelaksanaan tata tertib siswa. Evaluasi tata tertib siswa berbasis poin pelanggaran di SMK Negeri 3 Pacitan dilakukan secara kontinyu, Koordinasi dan evaluasi selalu dilakukan melalui forum rapat khusus, maupun lewat rapat dinas. rapat koordinasi WKS 2, STP2K, Wali kelas atau lewat rapat dinas sekolah.

Dibandingkan dengan penelitian ini, dalam penelitian yang dilakukan oleh Florence Edugie Ugboko. dan Dr. Alaba Adeyemi Adediwura (2012) mengadakan penelitian yang berjudul "*A Study of Principal Supervisory Strategies and Secondary School Discipline*". Penelitian ini berfokus pada strategi pengawasan dalam penyelesaian masalah disiplin di sekolah, perbedaan hubungan antara strategi pengawasan kepala sekolah dan pemeliharaan disiplin dalam sekolah, dengan tujuan untuk mengatasi disiplin siswa masalah di sekolah.

Metode yang di gunakan adalah metode survey dengan dua instrumen, Principals Supervisory Strategies Questionnaire (PSSQ)' dan 'Student's Disciplinary Trait Questionnaire (SDTQ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara strategi pengawasan yang digunakan oleh kepala sekolah dan masalah siswa disiplin. Oleh karena itu Disimpulkan bahwa kepala sekolah harus berusaha untuk menggunakan strategi pengawasan yang akan mengurangi masalah disiplin siswa di sekolah mereka.

Dalam penelitian ini diketahui bahwa penyusunan tata tertib siswa. Penyusunan tata tertib siswa berbasis poin pelanggaran di SMK Negeri 3 Pacitan melibatkan semua komponen sekolah yaitu kepala sekolah, komite sekolah, STP2K, guru mata pelajaran, guru Bimbingan Konseling, Wakil Kepala Sekolah dan dalam penyusunan tata tertib ini juga dilibatkan perwakilan siswa dari pihak OSIS. Hasil dari tata tertib yang telah disepakati bersama disosialisasikan pada semua elemen sekolah, komite, masyarakat umum. Sosialisasi dilaksanakan pada awal tahun pelajaran dengan memberikan dokumen tata tertib baik kepada siswa maupun orang tua. Dengan adanya sosialisasi yang ada semua pihak dapat memahami, menerima dan menjalankan segala hal yang tertulis dalam tata tertib tersebut.

Pelaksanaan aktivitas penindakan atau pemberian poin bagi pelanggar tata tertib dilakukan oleh seluruh guru dan tenaga kependidikan dengan cara mencatat siswa yang melanggar pada slip poin. Evaluasi dalam pelaksanaan tata tertib siswa berbasis poin pelanggaran di SMK Negeri 3 Pacitan dilaksanakan secara kontinyu. Evaluasi dilaksanakan untuk menentukan langkah lanjut yang harus diambil untuk memperbaiki pelaksanaan tata tertib siswa. Evaluasi tata tertib siswa berbasis poin pelanggaran di SMK Negeri 3 Pacitan dilakukan secara kontinyu, Koordinasi dan evaluasi selalu dilakukan melalui forum rapat khusus, maupun lewat rapat dinas. rapat koordinasi WKS 2, STP2K, Wali kelas atau lewat rapat dinas sekolah. Hal diatas sesuai teori yang dinyatakan oleh *American Academy of Pediatrics* merekomendasikan tentang hukuman di sekolah sebagai berikut “*that corporal punishment in schools be abolished in all states by law and that alternative forms of student behavior management be used*”. (AAP Policy.

2000). Hukuman dengan kekerasan fisik tidak mengembangkan perilaku dan kemampuan akademik siswa dan bahkan harus dihapuskan dari sekolah. Sekolah-sekolah dan para guru harus didorong untuk mengembangkan perilaku positif siswa yang akan mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman dan produktif.

Jika dibandingkan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Arab Naz, 2011 yang mengadakan penelitian yang berjudul “ *The Impact Of Corporal Punishment On Students Academic Performance/Career And Personality Development Up To Secondary Level Education In Khyber Pakhtunkhwa Pakistan*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman fisik memiliki dampak multidimensi terhadap prestasi akademik siswa / karir, jiwa dan pengembangan kepribadian. Studi ini menunjukkan bahwa guru pendidikan, pelatihan dan kesadaran mengenai cara membatasi hukuman fisik dan mengadopsi cara-cara alternatif untuk memperbaiki perilaku siswa. Penggunaan system poin pelanggaran siswa ini merupakan alternative untuk untuk memperbaiki perilaku siswa tanpa harus melakukan hukuman fisik.

Dibandingkan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Songul Kilimci, 2009 yang mengadakan penelitian yang berjudul “*Teacher Perceptions On Corporal Punishment As A Method Of Discipline In Elementary Schools*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekolah dimaksudkan untuk menjadi salah satu tempat paling aman di mana siswa memenuhi praktik pendidikan mereka. Namun banyak studi menunjukkan bahwa hukuman fisik diadopsi di seluruh dunia di banyak sekolah. Hukuman fisik sebagai alat untuk menyediakan disiplin dalam pendidikan: kecenderungan para guru sekolah dasar dan administrator untuk menggunakan hukuman fisik sebagai metode disiplin ini membuktikan bahwa hak-hak anak yang dilecehkan.

Penelitian ini, penelitian ini membahas mengenai aktivitas pengelolaan tata tertib siswa berbasis poin pelanggaran di SMK Negeri 3 Pacitan tidak lagi membahas masalah yang ditimbulkan mengenai dampak hukuman fisik yang diterima siswa. Dalam penelitian ini meneliti mengenai aktifitas penegakan tata tertib siswa berkaitan dengan kegiatan sebagai berikut a). Penyusunan tata tertib,

b). Sosialisasi pada semua warga sekolah, c). Pembentuk tim yang bertugas memantau dan menilai sikap, ucapan dan tindakan siswa di sekolah serta memberi poin, d). Mencatat hasil pemantauan / poin siswa dan mengkomunikasikannya, e). Guru, wali kelas, guru BK mencermati, mengawasi siswa yang bermasalah dan membantunya untuk memecahkan masalah yang dihadapi, f). Hasil pemantauan dan penilaian. Pengelolaan tata tertib siswa berbasis poin pelanggaran di SMK Negeri 3 Pacitan merupakan alternatif cara untuk memperbaiki perilaku siswa tanpa adanya hukuman fisik secara langsung yang dapat berdampak negatif bagi siswa itu sendiri.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasa di atas maka dapat disimpulkan bahwa 1) Organisasi penegakan tata tertib siswa di SMK Negeri 3 Pacitan menggunakan empat tahapan pengelolaan dalam organisasi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. 2) Sasaran yang terukur yang merupakan tujuan dari penerapan tata tertib siswa di SMKN 3 Pacitan adalah menekan tingkat pelanggaran ketertiban diatas 15 point menjadi 5% per bulan. 3) Mekanisme pengambilan tindakan dalam penegakan ketertiban di SMKN 3 Pacitan diatur dalam surat keputusan Kepala sekolah Nomor: 421.5/269.1/408.37.16.03/2011 tentang tata tertib Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Pacitan. 4) Pengawasan terhadap jalannya tata tertib dilakukan secara terus menerus oleh kepala sekolah dan tim STP2K sehingga penegakan tata tertib akan berjalan semakin baik. 5) Aktifitas penegakan tata tertib siswa di SMK Negeri 3 Pacitan berkaitan dengan kegiatan sebagai berikut yaitu : a). Penyusunan tata tertib siswa. b). Sosialisasi tata tertib siswa c). pelaksanaan aktivitas penindakan atau pemberian poin bagi pelanggar tata tertib poin. d). Pencatatan poin pelanggaran .e) Pembinaan yang dilaksanakan oleh guru Bimbingan dan Konseling dan f). Evaluasi Tata Tertib Berbasis Poin Pelanggaran di SMK Negeri 3 Pacitan

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dikemukakan beberapa saran, yaitu 1) Kepada Pihak Dinas Pendidikan, penelitian ini mengenai pengelolaan Tata Tertib Berbasis Poin Pelanggaran dapat tata tertib siswa dapat menjadi dapat menjadi masukan untuk menyusun kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan tata tertib siswa. 2) Kepada Kepala sekolah melakukan pengawasan secara kontinyu dan berkesinambungan agar tata tertib siswa yang ada, dapat dijalankan dengan sebaik mungkin sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif dan prestasi belajar dapat ditingkatkan. 3) Kepada Guru Kelas dan Guru Bimbingan Konseling dapat membimbing dan membina siswa dengan semaksimal mungkin kepada semua siswa, bahwa tata tertib yang ada bukan untuk dilanggar tapi dipatuhi dan dijalankan dengan penuh kedisiplinan yang nantinya akan bermanfaat bagi siswa itu sendiri.

Atas tersusunnya Naskah Publikasi ini tidak lupa penulis menyampaikan terima kasih kepada yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat 1) Prof. Dr. Bambang Setiadji Rektor UMS yang telah memberi berbagai sarana dan fasilitas dalam menyelesaikan studi di UMS. 2) Prof. Dr. Kudzaifah Dimyati, M. Hum. Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi. 3) Prof. Dr. Utama. Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta dan selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, dorongan dan saran kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini. 4) Kepala sekolah, guru, dan siswa SMK Negeri 3 Pacitan yang telah membantu dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- AAP Policy. 2000. Corporal punishment in schools . <http://aappolicy.aappublications.org/cgi/reprint/pediatrics;106/2/343>: diakses pada 2-01-2012:20.17 WIB)
- Arab Naz, 2011. *The Impact Of Coporal Punishment On Students Academic Performance/Career And Personality Development Up To Secondary Level Education In Khyber Pakhtunkhwa Pakistan*. International Journal of Business and Social Science Vol. 2 No. 12; July 2011

- Depdiknas.2001.Manajemen Peningkatan Mutu berbasis sekolah. Jakarta.Ditjen Dikdasmen.
- Florence E.Ugboko. dan Alaba A.Adediwura (2012). *A Study of Principal Supervisory Strategies and Secondary School Discipline* .
(http://www.mcser.org/index.php?option=com_content&view=article&id=299%3Aa-study-of-principal-supervisory-strategies-and-secondary-school-discipline&Itemid=63 diakses pada 18-07-2012; 21.29 WIB)
- Firawati, Titik. 2011. Mencegah kekerasan guru, (<http://www.borneonews.co.id/news/barito/8-newsflash/17338-mencegah-kekerasan-guru.html>: diakses pada 14-11-2011:09.30 WIB)
- Harsono. 2008. Model-model Pengelolaan Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jack O. Ajowi and Enose M. W. Simatwa, 2010. *The role of guidance and counseling in promoting student discipline in secondary schools in Kenya: A case study of Kisumu district*, (<http://www.academicjournals.org/ERR/PDF/Pdf%202010/May/Ajowi%20and%20Simatwa.pdf>
- KBRI Tokyo. 2003. UUSisdiknas, (<http://www.inherent-dikti.net/files/sisdiknas.pdf>; diakses pada 29-08-2011:22.35 WIB)
- Mitchell L Yell, Michael E Rozalski. 2008. Preventing School Failure. Washington: Spring 2008. Vol. 52, Iss. 3; pg. 7, 10 pgs
- Sagala, Syaiful. 2010. Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. Bandung: Alfabeta
- Smit, Marié Elizabeth. 2010. *The Role of School Discipline in Combating Violence in Schools in The East London Region*” (<http://ufh.netd.ac.za/handle/10353/224>; diakses pada 18-07-2012: 20.40 WIB)
- Songul Kilimci, 2009. *Teacher Perceptions On Corporal Punishment As A Method Of Discipline In Elementary Schools*. The Journal of International Social Research Volume 2 / 8 Summer 2009.
- Syam, M. Noor. 2008. Visi – misi sistem pendidikan nasional untuk kebangkitan indonesia menghadapi globalisasi – liberalisasi dan postmodernisme (<http://lab.pancasila.um.ac.id/dokumen/Visi.Misi.Pendidikan.Nasional-BDM-UM-Mlg-04-2008.doc>.diakses pada tanggal 19-11-2011, 21.30.44)
- Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

- Suharno. 2008. Manajemen Pendidikan; suatu pengantar bagi para calon guru. Surakarta. UNS Press.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2007. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosda karya
- Sutama. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, PTK R&D. Surakarta: Fairuz Media.
- W.Murphy, Laura. 2010. Corporal Punishment in Schools and Its Effect on Academic Success. (http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/CorpPunishStatement_041510.pdf. diakses pada 29-11-2011; 21.15 WIB)
- Winardi. 2009. Manajemen perilaku organisasi. Jakarta. Kencana

NASKAH PUBLIKASI

**PENGELOLAAN TATA TERTIB SISWA
BERBASIS POIN PELANGGARAN
(STUDI SITUS SMK NEGERI 3 PACITAN)**

TELAH DISETUJUI OLEH:

Pembimbing I



Prof. Dr. Utama, M.Pd

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2013**